



## Jurnal Ekonomi Syariah (JEKSYAR)

Annaafi Publisher

Journal Page is available to <http://jurnal.pptq-annaafi.org/index.php/jeksyar>



### FISCAL POLICY STRATEGIES AND TARGETS AND THEIR RELATIONSHIP WITH MINISTRIES AND OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS

Cindy Madiyaningsih<sup>1</sup>, Eti Soimah<sup>2</sup>, Fraditya Franasta Hastedo<sup>3</sup>, Intan Rahmat Dani<sup>4</sup>, Nila Agustini<sup>5</sup>, Nurshellia Rizqi Amalia<sup>6</sup>, Rudiyanto<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup> Prodi Ekonomi Syariah Institut Teknologi Bisnis – AAS Indonesia

Email: [cindymadiyaningsih13@gmail.com](mailto:cindymadiyaningsih13@gmail.com)<sup>1</sup>, [etoysoimah@gmail.com](mailto:etoysoimah@gmail.com)<sup>2</sup>, [fradityahastedo@gmail.com](mailto:fradityahastedo@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rahmadaniintan877@gmail.com](mailto:rahmadaniintan877@gmail.com)<sup>4</sup>, [nilaagustini62@gmail.com](mailto:nilaagustini62@gmail.com)<sup>5</sup>, [sheilalfian1@gmail.com](mailto:sheilalfian1@gmail.com)<sup>6</sup>, [rudy2196@gmail.com](mailto:rudy2196@gmail.com)<sup>7</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received : 4 Januari 2024  
Revised : 6 Januari 2024  
Accepted : 15 Januari 2024

##### Publisher :

Jurnal Ekonomi Syariah

#### ABSTRACT

##### Abstract

Fiscal policy is an important instrument in managing a country's economy. This article discusses fiscal policy strategies and goals and their relationship to stability and other government institutions. Fiscal policy strategies include the use of government revenues and expenditures to achieve economic goals, such as sustainable economic growth, controlling inflation, and reducing the unemployment rate. Fiscal policy can be expansionary, when the government increases spending or reduces taxes to encourage economic growth, or contractionary, when the opposite action is taken to control inflation. An appropriate fiscal policy strategy must take into account current economic conditions and the country's long-term goals. Fiscal policy goals can be diverse, including creating jobs, mitigating social inequality, and improving societal welfare. The importance of allocating resources to sectors that support long-term growth and meet societal needs is at the heart of an effective fiscal policy strategy. The relationship between fiscal policy and economic stability and other government institutions is very significant. Coordination between these various institutions is necessary to achieve policy continuity. In conclusion, fiscal policy is an important tool in managing a country's economy. Fiscal policy strategies and targets must be adjusted to current economic conditions and long-term goals. A close relationship with economic stability and other government institutions is the key to success in implementing effective fiscal policy.

Keywords: Strategies, Fiscal policy, Government.

##### Abstraksi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam mengelola ekonomi suatu negara. Artikel ini membahas strategi dan sasaran kebijakan fiskal serta hubungannya dengan stabilitas dan lembaga pemerintah lainnya. Strategi kebijakan fiskal mencakup penggunaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengendalian inflasi, dan pengurangan tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal dapat berupa ekspansif, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, atau kontraktif, ketika tindakan sebaliknya diambil untuk mengendalikan inflasi. Strategi kebijakan fiskal yang tepat harus mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan tujuan jangka panjang negara. Sasaran kebijakan fiskal dapat beragam, termasuk menciptakan lapangan kerja, memitigasi ketidaksetaraan

---

sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah inti dari strategi kebijakan fiskal yang efektif. Hubungan kebijakan fiskal dengan stabilitas ekonomi dan lembaga pemerintah lainnya sangat signifikan. Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah alat yang penting dalam mengelola ekonomi negara. Strategi dan sasaran kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini dan tujuan jangka panjang. Hubungan yang erat dengan stabilitas ekonomi dan lembaga pemerintah lainnya adalah kunci kesuksesan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal yang efektif.

**Kata Kunci:** Strategi, Kebijakan fiskal, Pemerintah.

## 1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik (Kementerian Keuangan RI, 2018). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran sehingga memerlukan suatu kebijakan fiskal untuk menghadapinya (Suparmono, 2004).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, demi mendukung penurunan tingkat defisit, pemerintah selalu menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD berada dalam batas yang telah ditetapkan yaitu di bawah 3%. Melalui APBN pemerintah berkewajiban untuk menjalankan peran dan fungsi sentral kebijakan fiskal agar stabilitas kinerja dari anggaran pendapatan dan belanja negara berada dalam kondisi baik dengan melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini, pemerintah juga akan melakukan efisiensi belanja negara serta penguatan terhadap kualitas belanja negara untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan melakukan efisiensi pembiayaan anggaran untuk mendorong keseimbangan primer menuju ke arah yang positif (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Terdapat tiga tolak ukur yang perlu dijaga dalam mempertahankan stabilitas kinerja dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu penerimaan pajak, defisit anggaran pemerintah dan kondisi keseimbangan primer APBN. Keseimbangan primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja dalam APBN yang tidak termasuk pembiayaan bunga dan cicilan pokok utang pemerintah.

Keseimbangan primer merupakan salah satu pendekatan untuk menilai kondisi kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Jika keseimbangan primer berada dalam kondisi defisit, maka penerimaan negara tidak dapat menutup pengeluaran sehingga untuk membayar bunga atau cicilan utang pokok menggunakan pokok utang baru. Hal tersebut beresiko terganggunya kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) karena beban bunga utang harus ditutup dengan penarikan utang baru sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal (Hidayat, 2014).

Kebijakan fiskal memiliki dampak langsung pada stabilitas ekonomi. Misalnya, pengeluaran berlebihan yang tidak seimbang dengan pendapatan dapat menyebabkan defisit anggaran yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi. Sebaliknya, pajak yang terlalu tinggi

atau pengeluaran yang terlalu rendah dapat meredakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang kebijakan fiskal dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan yang sesuai. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Lainnya: Pelaksanaan kebijakan fiskal melibatkan kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga pemerintah. Kementerian Keuangan, Bank Sentral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan banyak lembaga lainnya memiliki peran kunci dalam mengelola aspek-aspek tertentu dari kebijakan fiskal. Koordinasi di antara lembaga-lembaga ini penting untuk memastikan keselarasan dalam pencapaian tujuan ekonomi dan sosial.

## 2. Landasan Teori

Strategi dan sasaran kebijakan fiskal adalah elemen-elemen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Kedua aspek ini memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas ekonomi dan hubungan dengan lembaga pemerintah lainnya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang strategi dan sasaran kebijakan fiskal serta hubungannya dengan stabilitas ekonomi dan lembaga pemerintah lainnya:

### a. Strategi Kebijakan Fiskal

Strategi kebijakan fiskal adalah rencana umum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran fiskal dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu. Ini melibatkan pemilihan instrumen fiskal, seperti pajak dan pengeluaran publik, untuk memengaruhi aktivitas ekonomi. Strategi ini bisa mencakup:

- 1) Kebijakan Pajak: Pemutusan pajak, penyesuaian tarif pajak, atau insentif pajak untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengeluaran Publik: Penetapan prioritas pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.
- 3) Ketentuan Anggaran: Membuat perubahan dalam struktur anggaran yang memengaruhi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

### b. Sasaran Kebijakan Fiskal

Sasaran kebijakan fiskal adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui pengaturan kebijakan fiskal. Sasaran ini beragam dan dapat mencakup:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan konsumsi.
- 2) Stabilitas Harga: Mengendalikan inflasi agar tetap stabil.
- 3) Keseimbangan Anggaran: Memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akses ke layanan publik.
- 5) Ketahanan Ekonomi: Membangun ketahanan terhadap perubahan ekonomi dan krisis.

### c. Hubungan dengan Keuangan dan Lembaga Pemerintah Lainnya

Kebijakan fiskal tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan lembaga pemerintah lainnya, terutama lembaga keuangan dan badan-badan ekonomi seperti bank sentral.

Hubungannya meliputi:

- 1) Kontrol Anggaran: Pengeluaran pemerintah dan pendapatan harus dikontrol oleh lembaga keuangan, seperti Kementerian Keuangan, untuk memastikan ketaatan terhadap anggaran dan menghindari defisit anggaran yang berlebihan.
- 2) Perencanaan Ekonomi: Lembaga perencanaan ekonomi, seperti badan perencanaan nasional, dapat memberikan masukan dan panduan dalam merumuskan strategi dan sasaran kebijakan fiskal.
- 3) Legislatif dan Eksekutif: Hubungan yang baik antara cabang eksekutif pemerintah dan badan legislatif sangat penting untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.
- 4) Koordinasi dengan Bank Sentral: Koordinasi antara kebijakan fiskal (yang mencakup pengeluaran dan pendapatan pemerintah) dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral penting untuk mencapai stabilitas ekonomi yang kokoh.

Hubungan yang kuat antara kebijakan fiskal, lembaga pemerintah, dan keuangan sangat penting dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Koordinasi dan kerja sama yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola kebijakan fiskal.

### **3. Metode Penelitian**

Menurut Subagyo (dalam Bahry dan Zamzam, 2015) metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Priyono (2016:1) metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2017:3) adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.

### **4. Hasil Pembahasan**

Kebijakan Fiskal 1983-1997. Pada tahun 1958 – 1968 pemerintah mencari bantuan luar negeri dan meminjam dana di luar negeri yang berdampak pada inflasi yang kemudian menjadi babak awal keruntuhan ekonomi Indonesia (Sundrum, 1973). Dengan kondisi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa kebijakan yaitu anggaran belanja negara yang tidak melebihi anggaran penerimaan dalam negeri, perpajakan yang masih sederhana segera diperluas pada objek pajak dan dilakukan, pengeluaran pemerintah diusahakan untuk program yang mendapat prioritas, dan pengeluaran pemerintah diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan sumber sumber dalam negeri secara maksimal. Kebijakan Fiskal Tahun 1998 – Tahun 2000. Perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter mulai tahun 1997. Pemerintah mengatasinya dengan strategi kebijakan fiskal yaitu konsolidasi fiskal

untuk memulihkan kepercayaan dan penurunan kebangkrutan fiskal, kemudian dilanjutkan dengan reformasi fiskal yang lebih mengakar, reformasi perpajakan, reformasi kepabeanaan, reformasi anggaran, dan reformasi departemen keuangan (Budiono, 2004).

Kebijakan Fiskal Tahun 2001 – 2008 dalam tahun 2001, proses pemulihan ekonomi masih dipengaruhi oleh ketidakpastian, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang belum pulih, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing masih lemah, inflasi cenderung meningkat. Upaya yang dilakukan adalah dengan desentralisasi fiskal yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat. Tahun 2003 telah dilakukan kebijakan konsolidasi fiskal oleh Direktorat Bea dan Cukai tentang reformasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan penerimaan pajak dan iklim investasi yang lebih baik, kebijakan cukai rokok untuk mengatasi cukai palsu atas rokok sehingga penerimaan negara meningkat, reformasi administrasi kepabeanaan tentang perluasan jalur prioritas dan penyempurnaan prosedur verifikasi kepabeanaan untuk meningkatkan kepatuhan. Pada tahun 2004 Pemerintah terus menggiring wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan dan menggiring mereka menjadi wajib pajak yang patuh. Kebijakan fiskal tahun 2005-2008 adalah kebijakan sebagai penegasan kebijakan fiskal tahun 2004.

Kebijakan Fiskal 2009 – 2014, Pemerintah menerbitkan paket reformasi kebijakan. Paket kebijakan ini cukup luas, meliputi 85 usaha reformasi, yang antara lain mencakup UU Penanaman Modal yang baru, UU Perpajakan yang baru, serta amandemen UU Bea Cukai dan revisi UU Ketenagakerjaan. Kebijakan Selama Pandemi Covid-19. Stimulus kebijakan fiskal juga menjadi yang paling utama dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi ini terhadap kegiatan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak paling besar. Stimulus tersebut yaitu, percepatan belanja pemerintah, relaksasi pajak penghasilan, simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor.

## 5. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pentingnya Kebijakan Fiskal: Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan.
2. Koordinasi dengan Lembaga Lainnya: Hubungan yang baik antara lembaga pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan badan perencanaan ekonomi, sangat penting. Koordinasi yang baik antara lembaga ini akan membantu mencapai tujuan kebijakan fiskal.
3. Tujuan Kebijakan Fiskal: Sasaran kebijakan fiskal haruslah jelas. Mungkin mencakup menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, menstabilkan inflasi, atau mengurangi defisit anggaran. Sasaran-sasaran ini harus sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu.
4. Efisiensi Pengeluaran: Pemerintah harus berusaha untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Ini mencakup menghindari pemborosan, mengurangi birokrasi yang

berlebihan, dan mengutamakan program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

5. **Fleksibilitas Kebijakan:** Kebijakan fiskal harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan dalam situasi ekonomi. Ini memungkinkan pemerintah untuk merespons cepat terhadap perkembangan yang tidak terduga.

## References

- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018, 784-799.
- Ahmad, Subagyo. 2007. Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Elex Media. Komputindo.
- INDONESIA, P. R. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- A. Orsdemir, G. Tilki and F. Altinay, "Evaluation by Teachers of "Use of Influence in Agile Management" by School Administration," International Journal of Disability, Development and Education, pp. 1-13, 2019.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi kebijakan fiskal pemerintah Indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146-152.
- Subagiyo, A., Islah, K., Kumala, R., & Harjo, D. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2), 189-194.
- Sitio, Y., & Darmo, I. S. (2022). Beban Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Senopati. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 8(3), 2625-2634.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Iswahyudi, M. S., Wulandari, R., Samsuddin, H., Sukowati, I., Nurhayati, S., Makrus, M., ... & Febianingsih, N. P. E. (2023). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.